

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sengketa Laut Tiongkok Selatan telah menimbulkan instabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara disebabkan adanya aktivitas militer yang dilakukan oleh beberapa negara pengklaim dibandingkan memilih menggunakan jalur damai atau dengan diplomasi. Dampak yang dihasilkan oleh sengketa ini juga menyentuh hubungan personal antar negara anggota ASEAN, dimana sengketa ini menimbulkan rasa saling curiga dan ketidakpercayaan pada negara yang saling bersengketa. Dari empat negara pengklaim, dua negara yaitu Filipina dan Vietnam sama-sama mengeluarkan dekrit presiden terkait sengketa yang melibatkan wilayah yang didaulat masing-masing negara. Selain itu, sengketa yang terjadi antara kedua negara tersebut dengan Tiongkok dapat dikatakan lebih kompleks dibandingkan dua negara pengklaim lainnya yaitu Brunei Darussalam dan Malaysia.

Sebagai negara *non-claimer*, Indonesia yang menggunakan prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya menegaskan posisinya sebagai pihak yang menjadi penengah dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, berusaha mendorong tercapainya *Code of Conduct (COC)* antara ASEAN dengan Tiongkok. Indonesia sendiri telah sejak tahun 1990 berusaha menjadi fasilitator bagi pihak-pihak yang bersengketa melalui dialog-dialog telah dilakukan, sebagai mediator Indonesia juga menyatakan tidak akan memihak kepada pihak manapun yang sedang bersengketa. Sebagai negara *non-claimer* pihak pemerintah Indonesia memberikan penegasan bahwa Indonesia dan Tiongkok tidak memiliki sengketa teritorial, Indonesia menegaskan posisinya sebagai

pihak yang menjadi penengah dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, berusaha mendorong tercapainya *Code of Conduct (COC)* antara ASEAN dengan Tiongkok.

Concern Indonesia terhadap upaya penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan berada pada titik terendah pada masa pemerintahan Presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid. Hal ini bisa jadi disebabkan karena memang fokus pemerintah pada saat itu adalah untuk membenahi urusan dalam negeri yang sempat semrawut setelah krisis finansial yang terjadi. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie ia lebih memfokuskan kepada perbaikan citra Indonesia terkait kasus HAM yang terjadi di Timor Leste sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid fokus ditujukan kepada upaya memperbaiki perekonomian Indonesia pasca krisis finansial yang terjadi. Hal ini berdampak pada kurangnya perhatian yang diberikan Indonesia pada usaha penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. Sebaliknya, *concern* pemerintah terhadap upaya penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan berada di titik paling tinggi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pada masa pemerintahan Presiden SBY, Indonesia terlihat bersemangat untuk mewakili kepentingan ASEAN dan negara anggotanya. Selain itu, sesuai dengan pernyataan Martin Natalegawa bahwa pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di dalam forum internasional, Indonesia berusaha berperan sebagai pihak yang menjembatani perbedaan pandangan antar negara bangsa dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang kuat dan moderat.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, tidak semua fungsi yang disebutkan dalam argumen Dewi Fortuna Anwar terjalankan terkait dengan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Dengan mengacu kepada tujuan awal penelitian yaitu untuk mengkonfirmasi fungsi ASEAN bagi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden

Joko Widodo menggunakan argumentasi Dewi Fortuna Anwar dengan tinjauan Sengketa Laut Tiongkok Selatan, setelah melalui *process tracing*, terdapat empat fungsi yang tereleminasi dengan menjadikan sengketa Laut Tiongkok Selatan sebagai tinjauan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu ASEAN berperan dalam mendukung perkembangan ekonomi, ASEAN menjadi wadah bagi kerjasama militer bilateral diantara negara anggota ASEAN, ASEAN berkontribusi dalam perkembangan otonomi aturan kawasan, dan ASEAN meningkatkan kredibilitas internasional Indonesia. Sedangkan, terdapat empat fungsi ASEAN yang setelah melalui *process tracing* terkonfirmasi berjalan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan menjadikan sengketa Laut Tiongkok Selatan sebagai tinjauan, yaitu ASEAN membentuk dan menjaga citra Indonesia sebagai tetangga yang baik bagi stabilitas kawasan, ASEAN memainkan peran penting dalam meningkatkan *power* negara anggota dalam negosiasi internasional, ASEAN berperan sebagai *buffer* keamanan, dan ASEAN mendorong harmonisasi kawasan.

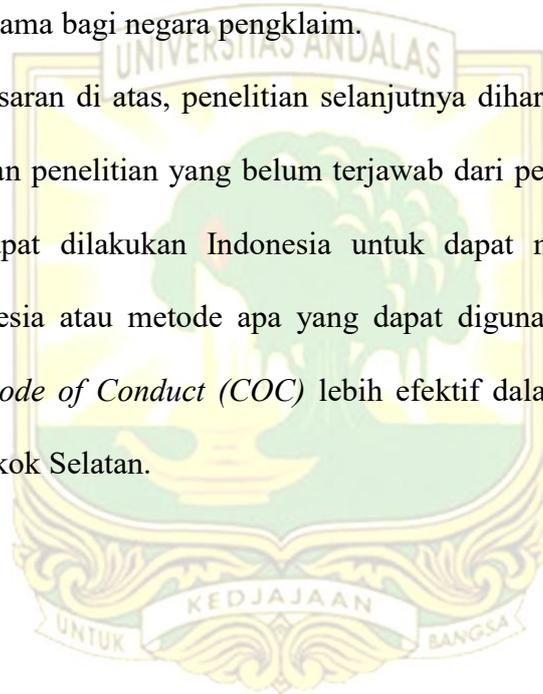
Selain itu, dari penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa fungsi ASEAN bagi Indonesia sebagaimana yang diungkapkan oleh Dewi Fortuna Anwar tidak bersifat mutlak. Fungsi ASEAN bagi Indonesia tidak dapat di generalisir karena pada praktiknya fungsi ini akan terus berubah atau bersifat dinamis sesuai dengan karakteristik dari pemimpin sebuah negara.

5.2. Saran

Sengketa Laut Tiongkok Selatan dapat terekskalasi dengan mudah jika pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menahan diri dan tidak mematuhi *Code of Conduct (COC)* yang telah disepakati dan diusahakan bersama. Berdasarkan kesimpulan diatas hanya terdapat empat fungsi ASEAN bagi Indonesia yang dijalankan dengan menjadikan sengketa Laut Tiongkok Selatan sebagai tinjauan dari

delapan fungsi yang disebutkan oleh Dewi Fortuna Anwar. Oleh karena itu, untuk dapat memaksimalkan fungsi ASEAN bagi Indonesia sesuai dengan yang disampaikan oleh Dewi Fortuna Anwar, sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan harus segera diselesaikan. Para pihak yang terlibat harus bisa menahan diri untuk tidak membuat sengketa yang terjadi terekskalasi dan menimbulkan konflik terbuka karena wilayah sengketa adalah wilayah yang menyimpan banyak kepentingan aktor-aktor internasional baik negara maupun non-negara. Semua pihak harus bersungguh-sungguh mengupayakan dan mendukung implementasi dari *Code of Conduct (COC)* terutama bagi negara pengklaim.

Berangkat dari saran di atas, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang belum terjawab dari penelitian ini. Contohnya upaya apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk dapat memaksimalkan fungsi ASEAN bagi Indonesia atau metode apa yang dapat digunakan untuk menjadikan implementasi dari *Code of Conduct (COC)* lebih efektif dalam proses penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan.



Lampiran

Tabel 4.8

Tabel Aliran *Foreign Direct Investment (FDI)* Dari Tiongkok ke ASEAN

| Sektor | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| [A] Pertanian, kehutanan, dan perikanan | 51.54 | 62.22 | 75.25 | 238.94 |
| [B] Penambangan dan penggalian | 1,122.41 | 274.69 | 110.87 | 649.58 |
| [C] Manufaktur | 748.66 | 762.79 | 1,122.83 | 1,590.30 |
| [D] Pasokan listrik, gas, uap dan pendingin udara | 387.31 | 554.46 | 491.46 | 916.72 |
| [E] Persediaan air; sewerage, pengelolaan limbah, dan kegiatan remediasi | -2.79 | 45.94 | 16.18 | 16.89 |
| [F] Konstruksi | 197.19 | 80.59 | 661.82 | 659.60 |
| [G] Perdagangan grosir dan eceran; perbaikan kendaraan bermotor dan motor | 269.02 | 564.69 | 1,766.85 | 2,783.14 |
| [H] Transportasi dan penyimpanan | -303.74 | 168.09 | -57.60 | 7.60 |
| [I] Kegiatan akomodasi dan layanan makanan | 23.63 | 46.80 | 809.02 | -180.09 |
| [J] Informasi dan Komunikasi | -2.93 | 3.40 | 29.05 | 155.35 |
| [K] Kegiatan Keuangan dan Asuransi | 1,844.84 | 1,678.39 | 3,441.17 | 1,609.14 |
| [L] Kegiatan Real estate | 2,105.65 | 2,005.29 | 2,418.03 | 3,069.28 |
| [M] Kegiatan profesional, ilmiah dan teknis | 23.50 | 12.34 | 53.14 | 58.52 |
| [N] Kegiatan administrasi dan layanan dukungan | 1.41 | 1.53 | 7.70 | 2.79 |
| [P] Pendidikan | 0.75 | 0.49 | 2.43 | 6.96 |
| [Q] Kesehatan manusia dan kegiatan pekerjaan sosial | 4.03 | 2.19 | 6.52 | 18.81 |
| [R] Seni, hiburan, dan rekreasi | -0.80 | 0.04 | 13.56 | 0.94 |
| [S] Kegiatan layanan lainnya | -290.81 | 245.25 | 95.44 | -233.58 |
| [Z] Aktivitas yang tidak ditentukan | 75.77 | 110.89 | 211.78 | 0.01 |
| [999] TOTAL kegiatan | 6,254.64 | 6,620.07 | 11,275.50 | 11,370.90 |

Sumber : <https://data.aseanstats.org/fdi-by-sources-and-sectors>